

KEBIJAKAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DALAM MENDUKUNG KEMANDIRIAN EKONOMI DESA MELALUI PENGEMBANGAN DESA WISATA SAMBIBULU TAMAN, SIDOARJO.

Oleh :
Yandika Sandah
(192020100037)

Dosen Pembimbing : Hendra Sukmana, S.AP., M.KP

**PRODI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS BISNIS, HUKUM, DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO
JANUARI, 2023**

Pendahuluan

Desa

Desa sebagai unit terkecil dalam sistem tata negara Indonesia yang dijadikan sebagai komponen integral dari pengembangan nasional.

Kebijakan- BUMDes

Pemerintah Indonesia mengeluarkan Kebijakan yang ditujukan oleh Pemerintah Desa yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang tertuang dalam Pasal 27 Ayat 01 yang menyatakan bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

Sebuah badan usaha yang seluruh maupun setengah dari modal tersebut dikuasai oleh desa melewati sebuah penyertaan pribadi yang berasal dari kekayaan sebuah desa dan dipisahkan untuk mengatur jalannya aset, jasa pelayanan, dan lainnya.

Kemandirian Ekonomi Desa

Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa yang bertujuan sehingga dapat mendukung kemandirian ekonomi desa.

Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo

Kurangnya memanfaatkan potensi yang ada sehingga mayoritas BUMDes di Kabupaten Sidoarjo mengembagkan potensi hanya sebagai bidang penyewaan dan perdagangan saja.

BUMDes Sambimadu Kec Taman, Sidoarjo

Salah satu BUMDes Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Peraturan Desa Sambibulu Tahun 2018 Nomor 3 Tentang Pemilikan Desa (BUMDes). Dalam inovasinya, pemerintah desa Sambibulu dan BUMDes Sambimadu mewujudkan pengembangan desa wisata melalui agrowisata Sambibulu.



Rumusan Masalah

Sumber Daya Manusia BUMDes Sambimadu kurang mendukung dan kurang berkompeten.

Pemerintah desa Sambibulu masih belum mampu merangkul keseluruhan masyarakat dalam berpartisipasi pelaksanaan kebijakan BUMDes

Pemerintah Desa Sambibulu belum bisa memberikan upah yang cukup bagi para pekerja Sambibulu.



Metode Penelitian

JENIS PENELITIAN

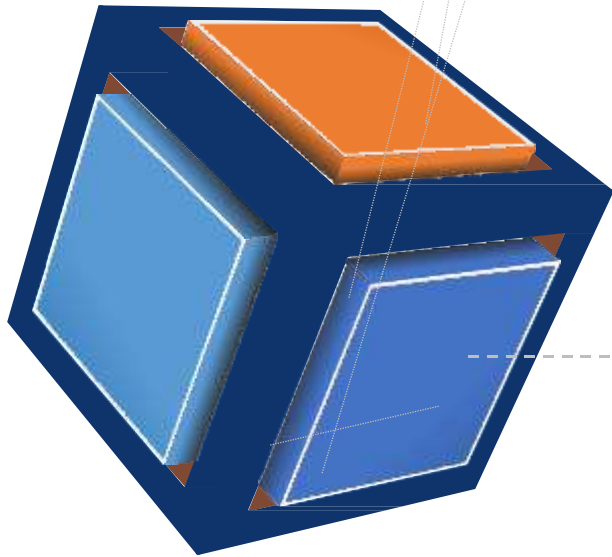
Penelitian Kualitatif dengan Metode Deskriptif

FOKUS PENELITIAN

Proses Implementasi Kebijakan BUMDes Dalam Mendukung Kemandirian Ekonomi Desa Melalui Pengembangan Desa Wisata Sambibulu Dengan Teori Implementasi

Kebijakan dari Van Meter dan Van Horn (1975) :

1. Standar dan Tujuan Kebijakan
2. Sumber Daya
 - a. Sumber Daya Manusia
 - b. Sumber Daya Financial
3. Komunikasi Antar Organisasi
4. Karakteristik Pelaksana
5. Disposisi Implementator
 - a. Respon Pelaksana
 - b. Kemampuan Kognisi
 - c. Intensitas Disposisi
6. Kondisi Lingkungan
 - a. Sosial
 - b. Ekonomi
 - c. Politik



LOKASI PENELITIAN

Desa Sambibulu Kecamatan Taman
Kabupaten Sidoarjo

TEKNIK PENENTUAN INFORMAN

Penelitian ini menggunakan **Teknik Purposive Sampling**.

SUMBER DATA

- Data Primer
- Data Sekunder

TEKNIK PENGUMPULAN DATA

- Wawancara Mendalam
- Observasi
- Studi Pustaka

Hasil

1. Standar dan Tujuan kebijakan dalam Implementasi Kebijakan BUMDes Melalui Pengembangan Desa Wisata

Dalam riset sebelumnya diawal tahun 2020 awal mula implementasi kebijakan BUMDes dalam pengembangan agrowisata Sambibulu. Kepala Desa Sambibulu , mengatakan “Untuk awal mula berdirinya Agrowisata ini, saya punya inisiatif untuk mengeruk tanah yang dijadikan sebagai area outbond. Pada saat itu memang muncul pro dan kontra yang terjadi dikalangan warga desa.

2. Sumber Daya Dalam Implementasi Kebijakan BUMDes Dalam Pengembangan Desa Wisata

01. SUMBER DAYA MANUSIA

| DAFTAR PENGURUS BUMDes AGROWISATA SAMBIBULU | | |
|---|---|--|
| No | Jabatan | Nama |
| 01 | Ketua | Juni Warsono |
| 02 | Sekretaris | Romadi, SE |
| 03 | Sie Pengembangan SDM | Mas'ulah Sisca |
| 04 | Sie Humas dan Publikasi | Mia Fury Rahayu |
| 05 | Sie Pengembangan Kreativitas dan Rekreasi | Mustofa |
| 06 | Sie Wahana Wisata | Fandy, Slamet Heryanto, Subur, Alfa Ridho, Alif Setiawan |
| 07 | Sie Perlengkapan | Mulyono, Abd.Rosyid, Wanto |
| 08 | Sie Keamanan & Ketertiban | Sukamto |

Sumber : Diolah oleh penulis, 2022

02. SUMBER DAYA FINANCIAL

| Data Pendapatan BUMDes Agrowiasata Sambibulu | |
|--|-------------------|
| Bulan | Jumlah pendapatan |
| September Tahun 2020 | Rp 17.500.000 |
| Oktober Tahun 2020 | Rp 13.500.000 |
| Oktober Tahun 2020 | Rp 13.500.000 |
| Desember Tahun 2020 | Rp 8.000.000 |
| Desember Tahun 2020 | Rp 10.000.000 |
| Desember Tahun 2020 | Rp 8.000.000 |
| Maret Tahun 2021 | Rp 8.000.000 |
| April Tahun 2021 | Rp 10.000.000 |
| Mei Tahun 2021 | Rp 20.000.000 |
| Juni Tahun 2021 | Rp 15.000.000 |
| Juni Tahun 2021 | Rp 10.000.000 |

Sumber: Pengurus BUMDes Agrowisata Sambibulu

3. Komunikasi Antar Organisasi Terkait dalam Implementasi Kebijakan

BUMDes Melalui Pengembangan Desa Wisata

Adanya komunikasi melalui koordinasi terlihat antara masyarakat desa dengan berbagai organisasi yang terlibat dalam pengembangan desa wisata antara lain, ibu-ibu PKK, karang taruna, BPD, serta DPM Jawa Timur mengelola program ODGJ dalam proses pelaksanaan kebijakan BUMDes Sambimadu dalam mengembangkan desa wisata. .

4. Karakteristik Organisasi Pelaksana Dalam Implementasi Kebijakan BUMDes Melalui Pengembangan Desa Wisata

Aktor pelaksana kebijakan BUMDes Sambimadu adalah Pemdес, kepala BUMDes, staff BUMDes serta warga. Pegawai BUMDes Sambimadu cenderung sibuk dengan kegiatannya masing-masing sehingga agrowisata Sambibulu hanya dibuka setiap hari sabtu minggu saja.



5. Disposisi Implementator Dalam Implementasi Kebijakan BUMDes Melalui Pengembangan Desa Wisata

Disposisi implementator dapat berpengaruh pada implementasi kebijakan BUMDes dalam pengembangan desa wisata melalui Agrowisata Sambibulu. Hasil menunjukkan pada indikator kognisi, terdapat kendala mengenai pemahaman mekanisme kebijakan BUMDes Sambimadu, yang menyebabkan proses implementasi kebijakan tidak dapat dilakukan secara optimal.

6. Kondisi Lingkungan Sosial, Ekonomi, Politik Dalam Implementasi Kebijakan BUMDes Melalui Pengembangan Desa Wisata

Proses implementasi kebijakan BUMDes dalam membangun kemandirian ekonomi desa melalui pengembangan desa tidak ditemui hambatan, sehingga dinyatakan berhasil dari segi lingkungan sosial, ekonomi dan politik.



PEMBAHASAN

1. Standar dan Tujuan kebijakan dalam Implementasi Kebijakan BUMDes Melalui Pengembangan Desa Wisata

Standar & Tujuan Kebijakan BUMDes dalam mengembangkan desa wisata dikatakan berhasil, hal ini terlihat melalui adanya kebijakan tersebut mampu meningkatkan pendapatan asli desa dan juga menyerap tenaga kerja, sehingga pengembangan desa wisata ini berhasil mengurangi angka pengangguran, meningkatkan perekonomian serta taraf hidup masyarakat desa dan juga meningkatkan kemandirian ekonomi desa. Serta masyarakat juga dapat memanfaatkan lahan area desa wisata untuk tempat



2. Sumber Daya Dalam Implementasi Kebijakan BUMDes Dalam

Pengembangan Desa Wisata

Penelitian menunjukkan bahwa dalam hal Sumber Daya Manusia ;

- Dalam proses pembangunan Agrowisata hanya terdapat beberapa masyarakat yang mau terlibat dan berkeinginan tinggi untuk membantu Proses Pengembangan Desa Wisata pada BUMDes Dimana pada saat awal- awal BUMDes Sambimadu mulai merintis membangun Desa Wisata banyak masyarakat yang mencaci dan tidak mau terlibat dalam proses Implementasi Kebijakan BUMDes.
- Dalam proses rekrutmen pegawai BUMDes berdasarkan pada kesukarelaan masyarakat desa Sambibulu. Dengan demikian, SDM BUMDes dapat dikatakan gagal untuk proses implementasi kebijakan BUMdes melalui pengembangan desa wisata disebabkan banyaknya SDM kawasan Agrowisata tidak berkualitas dan berkompoten serta belum memahami secara jelas tugas dan prosedur pengembangan desa wisata.

Penelitian menunjukkan, mengenai sumber pembiayaan ditengah pendapatan Agrowisata Sambibulu mengalami penurunan tetapi banyak asupan anggaran yang masuk untuk Agrowisata Sambibulu dalam pengembangannya, sehingga bisa disebut sumber pembiayaannya efisien karena sumber permodalannya sangat beragam, salah satunya Dana Desa dari APBDes dapat dimanfaatkan dengan baik dalam mengembangkan desa wisata.

3. Komunikasi Antar Organisasi Terkait dalam Implementasi Kebijakan BUMDes Melalui Pengembangan Desa Wisata

Adanya komunikasi melalui koordinasi terlihat antara masyarakat desa dengan berbagai organisasi yang terlibat dalam proses pelaksanaan kebijakan BUMDes Sambimadu dalam mengembangkan desa wisata. Selain itu Pemdes Sambibulu berkomunikasi dengan warganya untuk kegiatan sosialisasi dengan pertimbangan desa RKPDDes dan Musrenbangdes. Komunikasi pemerintah desa dan kepala BUMDes Sambimadu yang juga berkomunikasi dengan warga melalui koordinasi secara rutin mingguan dengan mengadakan pertemuan di kantor Agrowisata Sambibulu yang tak lain membahas perkembangan desa wisata.

4. Karakteristik Organisasi Pelaksana Dalam Implementasi Kebijakan BUMDes Melalui Pengembangan Desa Wisata

Karakteristik para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan BUMDes Sambimadu belum berhasil, dikarenakan terdapat kendala dari segi staff BUMDes yang memiliki karakter individualis yang mementingkan dirinya sehingga mereka tidak professional dan meremehkan tanggung jawabnya dalam mengoperasikan BUMDes. Berbanding terbalik, yang ditampilkan oleh pemerintah desa yang memperlihatkan penuh dukungannya dalam mengembangkan desa wisata.

5. Disposisi Implementator Dalam Implementasi Kebijakan BUMDes Melalui Pengembangan Desa Wisata

Pertama, Respon pelaksana terhadap implementasi kebijakan

Bahwa reaksi pemerintah desa terhadap kebijakan BUMDes mendukung penuh dalam implementasi kebijakan BUMDes mengembangkan desa wisata melalui dukungan finansial yang bersumber dari dana desa.



Kedua, Kemampuan Kognisi.

Beberapa pegawai BUMDes yang belum sepenuhnya memahami Implementasi Kebijakan BUMDes dalam mengembangkan desa wisata.

Ketiga, Intensitas Disposisi

Kepala Desa Sambibulu sebagai pionir mempunyai peranan penting dalam Implementasi Kebijakan BUMDes. Kepala Desa Sambibulu juga memahami tujuan dari Kebijakan BUMDes ini.

6. Kondisi Lingkungan Sosiasl, Ekonomi, Politik Dalam Implementasi Kebijakan BUMDes Melalui Pengembangan Desa Wisata

LINGKUNGAN SOSIAL

Ditemukan adanya keselarasan kondisi sosial mayoritas penduduk Sambibulu yang bermata pencaharian sebagai pedagang.

LINGKUNGAN EKONOMI

Dapat mengurangi angka pengangguran di Desa Sambibulu dan juga terbentuknya agrowisata ini secara perlahan, dapat membantu pendapatan ekonomi masyarakat lebih meningkat.

LINGKUNGAN POLITIK

Dalam pelaksanaan kebijakan BUMDes Sambimadu, mendapat bantuan dari Pemkab Sidoarjo untuk mengembangkan desa wisata.

Temuan Penting

Dapat dipahami bahwa suatu Kebijakan akan berhasil jika semua terlibat dalam Implementasi kebijakan tersebut saling terintegritas, bersinergi, dan berkolaborasi dengan baik. Dalam Implementasi Kebijakan BUMDes Sambibulu dalam proses pembangunan desa wisata dimana mengalami penolakan bahkan tidak adanya dukungan dari masyarakat desa, namun setelah desa wisata ini berdiri masyarakat memperoleh dampak baiknya dari segi sosial maupun ekonomi. Hal ini terbukti bahwa pemerintah desa mampu membuktikan kepada masyarakat bahwa dengan adanya BUMDes dalam pengembangan desa wisata ini dapat mensejahterakan masyarakat desa Sambibulu.

Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambah serta mengembangkan ilmu pengetahuan dalam mendukung teori-teori yang telah ada sehubungan dengan masalah yang diteliti.
- b. Sebagai bahan masukan dalam rangka proses implementasi Kebijakan BUMDes.
- c. Sebagai dasar untuk mengadakan analisis lebih lanjut bagi peneliti lain yang relevan

Manfaat Praktis

- a. Bagi pihak instansi, sebagai tolak ukur dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa melalui adanya BUMDes Sambimadu.
- b. Bagi mahasiswa, dari hasil penelitian ini Kebijakan BUMDes ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tambahan mengenai proses Implementasi Kebijakan BUMDes berjalan pada sebuah desa.
- c. Bagi Peneliti Selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai dasar kegiatan ilmiah untuk penelitian selanjutnya khususnya penelitian dibidang yang sama.

Referensi

- [1] Pangestu, A. T. “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Kedungrejo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo”. (Doctoral dissertation, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya). 2020.
- [2] Junaidi, Muhammad Adib. “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Penguatan Ekonomi Masyarakat di Desa Kedung Turi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo”. Diss. Universitas Airlangga, 2018.
- [3] Hartono, r. “KPPN Baturaja”. diambil dari <https://djpb.kemenkeu.go.id/>. 2021. Diakses pada mei 2022.
- [4] Sidik, Fajar. "Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa): Unit Usaha, Pendapatan, dan Inefisiensi." *Jurnal Ekologi Birokrasi* 5.3. pp: 36-46. 2017
- [5] Baut, P. “Disparekrafbud Dorong Desa Kembangkan Potensi Wisata”. Diambil dari Victory News Manggarai Barat: <https://mabar.victorynews.id/pariwisata/pr-3393520655/disparekrafbud-dorongdesakembangkan-potensi-wisata> . Diakses pada mei 2022.
- [6] Maulidiah, Nurul, and Suci Megawati. "Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pengembangan Desa Wisata (Studi Pada BUMDes Sambimadu, Desa Sambibulu, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo)." *Publika*. pp. 391-406. doi: <https://doi.org/10.26740/publika.v10n2.p391-406> 2022.
- [7] Suryadi, Asep, Budiman Rusli, and Mohammad Benny Alexandri. "Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung." *Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik* 4.1. pp. 29-46. DOI : <https://doi.org/10.24198/responsive.v4i1.34563>.2021
- [8] Liow, Happy, Florence Daicy Lengkong, dan Novie Anders Palar. "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Tondegesean Kecamatan Kawangkoan." *Jurnal Administrasi Publik* 4.61. 2018.
- [9] Novita, Ita.. "Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA) Di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan (Studi Kasus Di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Timur)." *JKKP. Bandar Lampung* vol.03. no.01. DOI: <http://dx.doi.org/10.36448/ejkpp.v3i1.847>. 2017.
- [10] Budiono, Pugu. "Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Bojonegoro (Studi di Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu Dan Desa Kedungprimpen Kecamatan Kanor)." *Jurnal politik muda* 4.1. pp.116-125. 2015.
- [11] Fauziyah, Wennyta Eka, and Lukman Arif. "Model Implementasi Kebijakan Van Meter Dan Van Horn Dalam Tinjauan Pembangunan Jalan Lingkar Selatan (Ring Road) Di Kabupaten Tuban." *Journal Publicuho* 4.2. pp.672-691. DOI: <https://doi.org/10.35817/jpu.v4i2.18573> 2021.
- [12] Nugroho, Aristiono, and Sutaryono Sutaryono. “*Ecotourism Lereng Merapi Pasca Konsolidasi Tanah.*” Yogyakarta:STPN Press, 2015.
- [13] Subarsono, A. G. "Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi." *Jogyakarta: Pustaka Pelajar*. 2011.

